

# SIT MO BAN

Sofian Effendi<sup>1</sup>

Warganegara keturunan dari Medan, Riau, Bangka, Belitung, dan Kalimantan Barat yang menggunakan dialek Khek, pasti kenal betul tiga kata ini dan maknanya. Sit mo ban, yang terjemahannya kira-kira makan nggak bayar, adalah ekspresi kegembiraan yang digunakan oleh warga keturunan tidak mempunyai ketika salah seorang warga kaya di kampung akan menyelenggarakan pesta besar Semuanya pasti dapat makan sekenyang-kenyangnya secara prodeo. Dalam perjalanan waktu, ekspresi ini kemudian mengalami perubahan makna. Dia juga digunakan untuk menggambarkan perilaku sogok-menyogok oleh penguasa.

Mungkin, tiga huruf ini dapat juga kita gunakan untuk mengekspresikan sikap ketergantungan yang berlebih-lebihan kepada pemerintah dalam berbagai bidang. Entah disengaja atau tidak, Pemerintah selama ini telah menciptakan ketergantungan yang besar pada rakyat, karena telah memberi subsidi yang besar pada pelayanan kesehatan, pendidikan, air bersih, energi, dan komunikasi, pokoknya semua yang menyangkut hajat hidup orang banyak.

Akibatnya, subsidi yang harus dikeluarkan oleh Pemerintah semakin tahun semakin besar. Pada APBN 2003, biaya “ketergantungan” ini mencapai Rp. 56 trilyun, jauh lebih besar dari anggaran pendidikan, kesehatan atau pun anggaran untuk pembangunan ekonomi.

“Ketergantungan” yang telah diciptakan oleh Pemerintah tidak saja perlu dukungan finansial yang semakin besar. Banyak warga bangsa belum menyadari bahwa program-program pelayanan publik tersebut telah menimbulkan ketidakadilan. Berbeda dengan harapan, program yang menerima subsidi besar dari pemerintah ternyata tidak mampu menciptakan keadilan akses bagi golongan tidak mampu. Di tanah air, ketimpangan akses dialami pada semua program pelayanan publik seperti pendidikan, kesehatan, air bersih, dan yang lainnya. Ketimpangan akses ini tidak hanya terjadi di Indonesia, tetapi juga dialami oleh banyak negara.

Dampak paling mengkhawatirkan dari bertahun-tahun melaksanakan program kesejahteraan tersebut adalah terciptanya budaya ketergantungan. Dalam budaya seperti itu, setiap orang lalu berbicara soal hak tetapi melupakan tanggungjawab, sesuai dengan kemampuan masing-masing. Warga kota merasa berhak mendapat air bersih yang murah dari pemerintah. Warga desa merasa berhak mendapatkan pengobatan di Puskesmas dengan biaya serendah-rendahnya. Mahasiswa merasa berhak mendapatkan pendidikan

---

<sup>1</sup> Penulis adalah Guru Besar Kebijakan Publik dan Rektor UGM

tinggi dengan biaya murah. Karena itu slogan yang selalu diteriakkan pada demo-demo adalah “cheap and quality education for all”.

Nampaknya ketergantungan kepada pemerintah telah merambah hampir semua lapisan masyarakat. Warga masyarakat selama ini terbiasa “sit mo ban” sehingga lupa kalau peningkatan jangkauan dan kualitas layanan publik, kesehatan dan pendidikan adalah tanggung jawab bersama pemerintah dan masyarakat.

Pendidikan tinggi adalah bidang pelayanan publik yang tingkat kepadatan teknologi mau pun sumber daya manusianya amat tinggi. Agar selalu terdepan dari masyarakatnya dalam bidang ilmu pengetahuan dan teknologi, perguruan tinggi memerlukan bahan literatur terbaru, sumber informasi terbaru, serta mesin-mesin dan peralatan terbaru dan tercanggih. Literatur, sumber informasi, mesin-mesin dan peralatan tersebut mahal harganya, karena hampir seluruhnya harus diimpor dari negara lain. Perguruan tinggi juga memerlukan SDM terbaik, yang memiliki kualifikasi akademik tertinggi bergelar S-3 dari PT yang diakui. Biaya mendidik seorang lulusan S-3 di luar negeri mahal sekali, berkisar antara Rp. 4 sampai 6 miliar per orang. Di dalam negeri, biaya untuk menjadi seorang lulusan S-3 berkisar antara Rp. 250 sampai 300 juta.

Biaya yang diperlukan untuk menyelenggarakan pendidikan S-1 di UGM rata-rata Rp. 11 juta per mahasiswa per tahun. Besarnya biaya memang bervariasi, dari Rp. 9-10 juta untuk fakultas non-eksakta, Rp. 13-14 juta untuk fakultas eksakta, dan sekitar Rp. 19 juta untuk fakultas kedokteran. Standar biaya UGM ini lebih rendah dari standar biaya nasional, yang mencapai Rp. 18 juta dan hanya 1/14 standar biaya pendidikan di Malaysia, padahal biaya hidup di sana tidak berbeda jauh dari Indonesia.

Standar biaya pendidikan UGM rendah karena komponen pokok seperti gaji dosen dan pegawai amat rendah, dan biaya penyelenggaraan proses pembelajaran, pengadaan buku, pengadaan peralatan, bahan habis pakai, pengadaan buku serta akses ke jaringan internet, hanya seadanya. Menurut seorang rekan, peralatan praktikum di Fakultas Teknik sebagian besar sudah kuno dan sudah tidak sesuai lagi dengan perkembangan teknologi. Koleksi buku di perpustakaan universitas dan fakultas banyak yang sudah usang dan dana untuk pengadaan bahan literatur terbaru tidak tersedia.

Sementara banyak dosen harus “main sirkus” ke PTN dan PTS untuk sekedar mendapat tambahan pendapatan agar dapat memberi makan keluarga dan menyekolahkan anak-anaknya. Sebenarnya, “subsidi” pendapatan dari kegiatan di luar itulah yang memungkinkan para dosen dan karyawan dapat melaksanakan tugas rutin mereka di Kampus ini. Dengan kata lain, setiap mahasiswa PTN selain menerima subsidi langsung sebesar lebih kurang 80 persen dari pemerintah dan alma maternya, juga menerima subsidi tidak langsung dari setiap dosen sebesar penerimaan tambahan dosen dibagi banyak mahasiswa yang diasuhnya.

Akibatnya, pendidikan tinggi kita terus menerus terpuruk mutunya. Menurut majalah Asiaweek, pada tahun 1999 posisi UGM ada di urutan ke 67 dari 77 PT bermutu di Asia. Pada tahun 2000 posisi UGM melorot ke peringkat 68.

Semua ini terjadi karena negara, khususnya para pemegang hak begrooting, belum memberikan perhatian tinggi pada bidang pendidikan. Anggaran pemerintah untuk pendidikan bukan saja rendah tetapi semakin turun dari tahun ke tahun. Pada 1980 anggaran pendidikan sebesar 1,2 persen dari PDB, turun menjadi 1,0 persen pada 1990, dan turun lagi menjadi 0,8 persen pada 2000. Sementara di negara tetangga, anggaran pendidikan tidak saja hampir lima kali lebih besar, tetapi juga semakin meningkat dari waktu ke waktu. Pada kurun waktu yang sama anggaran pendidikan Malaysia pada 1980 telah mencapai 5,1 persen dari PDB, kemudian naik menjadi 5,5 persen pada 1990, dan menjadi 5,8 persen pada 2000.

Seperti di banyak “welfare state”, akses golongan tidak mampu pada PT tidak menunjukkan tanda-tanda keadilan. Menurut temuan Susenas 2001, secara nasional akses golongan tidak mampu hanya 3,3 persen, sedangkan golongan kaya, mencapai 30,6 persen. Di DIY, akses golongan tidak mampu hampir dua kali lipat tingkat nasional, 6,7 persen. Tetapi akses golongan kaya mencapai 76,7 persen. Dengan kata lain, kesenjangan akses hampir 10 kali lipat di tingkat nasional dan 13 kali di DIY.

Dari perspektif keadilan, jalur masuk UM-UGM ternyata lebih efektif dalam mengoreksi ketimpangan akses pendidikan tinggi. Melalui jalur ini akses golongan tidak mampu mencapai 9,6 persen – yang bebas SPMA -- dan golongan kaya – yang menyumbang SPMA sebesar Rp. 5 juta ke atas -- hanya 26,6 persen. Dengan kata lain, kesenjangan akses hanya 2,6 kali, jauh lebih kecil dari tingkat kesenjangan akses di tingkat nasional dan di DIY.

Berkali-kali pihak PTN telah berusaha menjelaskan kalau pendidikan tinggi bermutu memang mahal biayanya. Namun masih ada saja warga masyarakat, entah kelompok kecil mahasiswa, entah warga golongan tertentu, termasuk sebagian anggota Komisi DPR yang membidangi masalah kesra, yang masih saja senang mendengarkan nada populis. Jangan-jangan bukan karena tidak faham, tetapi karena biasa sit mo ban.

Yogyakarta, 28 Juni 2003